

## Implementasi Program Kebijakan Madrasah dalam Peningkatan Mutu Kompetensi Lulusan

Hambali Bachtiar<sup>1</sup>, Titik Umiati<sup>2</sup>, Ansori<sup>3</sup>, Jamrizal<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Nusanantara Batang Hari, Indonesia  
e-mail: [bachtiarhambali223@gmail.com](mailto:bachtiarhambali223@gmail.com)

### Abstrak

Madrasah sebagai lembaga pendidikan harus menjaga mutu dalam bidang pendidikan umum maupun agama dan mutu pendidikan pada umumnya, dan tentunya harus berusaha keras untuk dapat memenuhi keduanya. Faktanya, kedua karakteristik tersebut belum sepenuhnya tercapai. Untuk mempertahankan kedua kualitas tersebut, kualitas lulusan madrasah mungkin lebih rendah dibandingkan sekolah negeri. Artinya belum seimbangnya mutu pendidikan umum dengan mutu pendidikan agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan kebijakan sekolah dan madrasah dapat membantu meningkatkan kualitas kompetensi lulusan. Penelitian kualitatif dilakukan menggunakan metode studi pustaka atau survei untuk meninjau berbagai publikasi akademik dan literatur terkait. Kualitas siswa yang lulus dari institusi pendidikan sangat terkait dengan proses pembelajaran dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Saat ini, lulusan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengamalkan ajaran agama, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan, khususnya di madrasah. Namun, faktanya masih banyak lulusan madrasah yang kurang menunjukkan sifat, moral, dan pengamalan ajaran agama yang baik, serta kurang dalam prestasi akademik dan non-akademik. Pembelajaran yang berkualitas menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang diharapkan. Hasil pendidikan yang baik adalah lulusan yang dapat melanjutkan pendidikan atau bekerja. Saat ini, lulusan sekolah dan madrasah diharapkan dapat mengamalkan ajaran Islam, menguasai ilmu pengetahuan, dan memiliki keterampilan dan keahlian yang tinggi. Namun, banyak yang gagal membaca Al-Qur'an, mengamalkan ajaran agama, atau memiliki keterampilan dan keahlian yang kurang.

**Kata Kunci :** *Implementasi program kebijakan madrasah, Mutu kompetensi lulusan*

### Abstract

Madrasah as educational institutions must maintain quality in the fields of general and religious education and the quality of education in general, and of course must try hard to fulfill both. In fact, these two characteristics have not been fully achieved. To maintain these two qualities, the quality of madrasah graduates may be lower than that of state schools. This means that the quality of general education is not balanced with the quality of religious education. The aim of this research is to evaluate how the implementation of school and madrasah policies can help improve the quality of graduate competencies. Qualitative research was carried out using library study or survey methods to review various academic publications and related literature. The quality of students who graduate from educational institutions is closely related to the learning process and is influenced by various factors. Currently, graduates are expected to have the ability to practice religious teachings, have noble character, and have knowledge, especially in madrasahs. However, the fact is that there are still many madrasah graduates who do not demonstrate good character, morals and practice of religious teachings, and lack academic and non-academic achievements. Quality learning produces graduates who have the expected abilities. Good educational outcomes are graduates who can continue their education or work. Currently, school and madrasah graduates are expected to be able to practice Islamic teachings, master knowledge, and have high skills and expertise. However, many fail to read the Koran, practice religious teachings, or have insufficient skills and expertise.

**Keywords :** *Implementation of madrasah policy programs, Quality of graduate competencies*

## **PENDAHULUAN**

Suatu bangsa tidak hanya memerlukan bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kekayaan moral dan karakter dari setiap warganya. Untuk itu perlu adanya sistem pendidikan yang berkualitas baik di sekolah, khususnya yang mempunyai meterai persetujuan agama (madrasah). Sebab sekolah dan guru mempunyai tanggungjawab ganda terhadap siswanya. Pendidikan adalah aspek krusial dalam kehidupan yang mempengaruhi masa depan individu. Selain memenuhi kebutuhan kemanusiaan, pendidikan juga berperan penting dalam mencapai tujuan pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup bangsa, sebagaimana dinyatakan dalam Tujuan Pendidikan Nasional. Dengan pendidikan yang berkualitas, masyarakat dapat memperbaiki kondisi hidup mereka sehari-hari.

Bab II, ayat 3, membahas fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan hidup bangsa dengan mengembangkan kemampuan, karakter, dan peradaban yang bermartabat. Tujuannya adalah agar siswa dapat mencapai potensi terbaik mereka sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, dan mandiri (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Sekolah/Madrasah sebagai lembaga pendidikan harus menjaga mutu dalam bidang pendidikan umum maupun agama dan mutu pendidikan pada umumnya, dan tentunya harus berusaha keras untuk dapat memenuhi keduanya. Faktanya, kedua karakteristik tersebut belum sepenuhnya tercapai. Untuk mempertahankan kedua kualitas tersebut, kualitas lulusan madrasah mungkin lebih rendah dibandingkan sekolah negeri. Artinya belum seimbangnya mutu pendidikan umum dengan mutu pendidikan agama. Buruknya mutu pendidikan di sekolah/madrasah berdampak pada kualitas lulusan sekolah/madrasah. Rendahnya kualitas lulusan sekolah/madrasah disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Kurikulum yang masih belum efektif, relevan dan fleksibel. Sebagian besar kurikulum akan terus ditentukan oleh pusat. (2) Proses belajar mengajar (PMB) di sebagian besar tidak merangsang kreativitas siswa dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam prestasi dan etos kerja yang baik. (3) Umpan balik siswa sebagian besar berkualitas rendah dan kurangnya program dukungan untuk membantu siswa yang tidak termotivasi untuk mengikuti program di lembaga pendidikan. (4) Kurangnya sumber daya untuk pengembangan sekolah/madrasah. Kualitas lulusan yang rendah dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakmampuan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menyelesaikan studi, atau bahkan mendapatkan pekerjaan. Walaupun mereka diperbolehkan bekerja, mereka sering kali tidak berhasil, tidak dapat mengikuti perkembangan sosial, dan kurang produktif. Lulusan yang kurang produktif menjadi beban bagi masyarakat dan terpinggirkan dalam peran sebagai warga negara.

## **METODE**

Dalam menyusun tugas ini, penulis menerapkan teknik penelitian kepustakaan dengan melakukan survei terhadap berbagai buku dan karya akademik lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas, yaitu organisasi atau desain kurikulum. Data diperoleh melalui dokumentasi berbagai informasi seperti majalah dan buku. Proses selanjutnya adalah penulis mempertimbangkan beberapa majalah, artikel, esai, buku dan sumber yang cocok untuk tulisannya. Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, keabsahan data yang diperoleh diuji dengan triangulasi dan didukung oleh referensi tambahan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Implementasi Program Kebijakan Sekolah/Madrasah**

Implementasi merujuk pada pelaksanaan rencana yang telah disusun secara teliti dan mendetail. Proses ini biasanya dilakukan setelah rencana dianggap sudah sempurna. Nurdin Usman mengungkapkan bahwa implementasi berkaitan dengan adanya aktivitas, tindakan, atau mekanisme sistem tertentu. Pelaksanaan bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi merupakan suatu tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu (Nurdin Usman, 2022). Implementasi Inti merupakan kegiatan pendistribusian hasil kebijakan yang dilakukan pelaksana kepada kelompok sasaran guna mencapai implementasi kebijakan. Kebijakan dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang disusun oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang selaras dengan

tujuan dan aspirasi bersama dalam membangun negara. Selain itu, kebijakan pendidikan mencakup seluruh proses dan hasil yang telah dirancang pada tahapan-tahapan kunci dalam pendidikan, yang dituangkan melalui visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan masyarakat dalam periode tertentu. Kebijakan pendidikan adalah keputusan yang berbentuk panduan untuk bertindak, yang bisa sederhana atau kompleks, umum atau spesifik, dan bisa sangat terperinci atau lebih longgar. Kebijakan ini disusun melalui proses politik untuk menentukan arah tindakan, program, dan rencana dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan pendidikan dibuat sebagai respons terhadap masalah dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini mencakup kumpulan undang-undang atau peraturan yang mengatur sistem pendidikan, termasuk tujuan pendidikan dan metode untuk mencapainya.

Untuk memenuhi harapan pelanggan pendidikan, manajemen sekolah perlu mengembangkan sistem secara bertahap dan berkelanjutan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat pimpinan (administrator, administrator, pengawas) dan Kami berupaya untuk meningkatkan kualitas lulusan Tanggung jawab pribadi untuk mencapai kualitas. Sekolah merupakan salah satu basis terpenting Gerakan, mendidik dan menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa. Isi kegiatan sekolah erat kaitannya dengan atau pendidikan budaya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional sekolah memerlukan pendidikan dan pengetahuan. Sekolah tidak bersifat statis; perubahan dapat terjadi kapan saja dan bersifat pasti serta sulit diprediksi. Kebijakan sekolah yang dilakukan untuk peningkatan mutu sekolah bagi peserta didik dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain aspek profesionalitas guru, aspek kepala sekolah, perpustakaan pelengkap, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Oleh karena itu, mutu atau kebaikan suatu sekolah atau lembaga pendidikan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi mutu, kami telah menghasilkan lulusan yang berkualitas atau berkualifikasi tinggi (Deden Makbuloh, 2016).

Menurut Zamroni yang dikutip oleh Widiyarti, ada beberapa langkah untuk meningkatkan kualitas, yaitu:

- a. Melakukan audit atau penilaian terhadap sekolah;
- b. Menciptakan visi, misi, strategi, dan program kerja;
- c. Meningkatkan kepemimpinan partisipatif;
- d. Melakukan intervensi di berbagai tingkat;
- e. Meningkatkan budaya sekolah;
- f. Menyediakan sumber daya keuangan; dan
- g. Memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki (Widiyarti dan Suranto, 2019).

Program kebijakan sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan agar lebih terencana dan tertangani sebagai penentu mutu lulusan :

- a. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang mengikuti kurikulum dan memenuhi kebutuhan siswa
- b. Peningkatan sistematis fungsi lapangan dan manajemen lembaga pendidikan.
- c. Penyempurnaan media pembelajaran.
- d. Peningkatan mutu SDM pendidikan.
- e. Peningkatan kesejahteraan SDM pendidikan.
- f. Peningkatan kualitas siswa.
- g. Menciptakan kolaborasi dengan masyarakat.
- h. Meningkatkan pendidikan yang memasukkan perspektif keagamaan di sekolah. (Deden Makbuloh, 2026)

Implementasi kurikulum tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga seluruh elemen dan komponen penyelenggara pendidikan di lembaga pendidikan. Tentu saja keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan elemen madrasah menjadi elemen penting dalam peningkatan mutu pendidikan di lembaga tersebut. Untuk mengendalikan hal tersebut, kepala madrasah harus mampu menerapkan sistem manajemen yang mencakup seluruh komponen sumber daya yang ada di madrasah. (Pramulyani, 2019)

## Mutu Kompetensi Lulusan

Edward Sarris mengatakan bahwa gairah dan harga diri seseorang terkait dengan kualitas. Selain itu, ia menyatakan bahwa kualitas dalam pendidikan merupakan faktor penting yang membedakan keberhasilan dan kegagalan, dan merupakan komponen penting yang harus dibangun di setiap lembaga pendidikan. Kualitas dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat yang pelanggan harapkan tercapai, dan dia menekankan bahwa kualitas adalah sesuatu yang dapat diperbaiki terus-menerus karena tidak ada proses yang sempurna (Nur Zazin, 2011). Pendidikan memiliki ukuran yang berbeda-beda, jadi mutunya relatif. Namun, jika dilihat secara umum, pendidikan dianggap berkualitas jika mampu memuaskan harapan pelanggan dan memenuhi persyaratan dan standar mereka (Engkoswara dkk, 2015).

Dalam istilah, kualitas lulusan merupakan elemen penting yang menjadi sasaran utama bagi sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan (Nur Zazin, 2011). Mutu lulusan merujuk pada ukuran kualitas atau tingkat keunggulan dari hasil pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga. Menurut penjelasan dalam UU No 20 Tahun 2003, pasal 35, standar kompetensi lulusan mencakup kualifikasi kemampuan lulus yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dicapai oleh peserta didik di tingkat pendidikan tertentu. Peningkatan kualitas lulusan sangat bergantung pada adanya pendidikan yang berkualitas. Dalam pandangan buku tersebut, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan keterampilan, ketajaman, dan kecakapan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa faktor yang menunjukkan kualitas pendidikan yang baik, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Standar kinerja mahasiswa pascasarjana harus minimal setara dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan atau sekolah perlu menetapkan standar mutu lulusan yang setidaknya sebanding dengan standar nasional pendidikan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan jelas dan terukur.
- b. Selain menetapkan standar mutu, lembaga pendidikan atau madrasah yang baik juga perlu memiliki standar kompetensi dan keterampilan dasar yang jelas. Hal ini penting agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
- c. Institusi pendidikan wajib menetapkan visi dan misi yang jelas yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi lembaga pendidikan atau sekolah tersebut.
- d. Lembaga pendidikan yang berkualitas adalah lembaga yang secara konsisten memiliki kebijakan mutu yang jelas mengenai standar isi dan penilaian. Kebijakan ini penting sebagai pedoman untuk proses pendidikan di masa depan.
- e. Institusi pendidikan harus mempunyai tujuan yang akan dicapai dan terukur. Hal ini sangat krusial dalam proses pembelajaran yang terarah.
- f. Profil lulusan perlu dideskripsikan untuk setiap mata pelajaran. Setiap institusi diharapkan dapat menggambarkan profil lulusannya dengan baik pada setiap mata pelajaran agar bisa menjadi acuan dan tolok ukur dalam proses pendidikan.
- g. Setiap mata pelajaran harus bertujuan untuk mendidik individu yang taat beragama, berbudi pekerti luhur, sehat, berpengetahuan, kompeten, kreatif, mandiri, serta mampu berkontribusi pada masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab (Nur Zazin, 2011).

Ada dua faktor yang berpengaruh dalam proses belajar. Faktor internal melibatkan aspek fisiologis, sosiologis, dan psikologis yang terdapat pada pendidik dan peserta didik. Kemudian faktor eksternal mencakup semua elemen di luar pendidik dan peserta didik yang mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran di kelas. Faktor eksternal ini meliputi input dari lingkungan, peralatan, dan berbagai input eksternal lainnya (Abdul hadis, Nurhayati, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan mutu lulusan tidak meningkat secara merata. Pertama, pendidikan digunakan sebagai fungsi produksi atau analisis input-output yang tidak dilakukan secara teratur dalam kebijakan dan pelaksanaan pendidikan nasional. Menurut pendekatan ini, lembaga pendidikan berfungsi sebagai pabrik yang akan menghasilkan output yang diinginkan jika semua input yang diperlukan dipenuhi. Kedua, mengingat bahwa sistem pendidikan nasional diatur secara birokratis dan terpusat, madrasah sering kali tergantung pada keputusan birokrasi yang lama dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kondisi aktual madrasah. Ketiga,

banyak orang, terutama orang tua siswa, tidak terlibat dalam pendidikan saat ini. Dalam kebanyakan kasus, partisipasi masyarakat terbatas pada dukungan keuangan dan tidak termasuk elemen proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas (Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2001).

## KESIMPULAN

Peningkatan kualitas lulusan sangat bergantung pada adanya pendidikan yang berkualitas. Menurut buku tersebut, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan keterampilan, ketajaman, dan kemampuan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ada beberapa alasan mengapa kualitas pendidikan tidak meningkat secara merata. Pertama-tama, hal ini disebabkan oleh kebijakan dan pelaksanaan pendidikan nasional yang mengadopsi pendekatan fungsi produksi pendidikan atau analisis input-output, namun pendekatan tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Menurut pendekatan ini, lembaga pendidikan berfungsi sebagai pabrik yang, dengan semua input yang diperlukan, akan menghasilkan produk yang diinginkan. Kedua, karena sifat birokratis-sentralistik penyelenggaraan pendidikan nasional, madrasah akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang terkadang tidak sejalan dengan kondisi lapangan. Ketiga, masyarakat, khususnya orang tua siswa, tidak terlalu terlibat dalam pendidikan saat ini. Penerapan kurikulum berbasis kebutuhan dan pencapaian tujuan pembelajaran khususnya di madrasah. Oleh karena itu penerapan kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kurikulum yang dilaksanakan di Madrasah Belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengajaran, sehingga membantu tercapainya peningkatan mutu lulusan. Faktor pendukungnya adalah kemauan kuat para guru untuk mensukseskan program peningkatan mutu sekolah pascasarjana, serta dukungan dan partisipasi sebagian masyarakat terutama yang berilmu luar biasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hadis. 2015. Nurhayati. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Deden Makbuloh. 2016. *Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta. Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. 2001. Jakarta. UPT Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Edward Sallis. 2015. *Total Quality Managemen In Education*. Yogyakarta. IRCiSoD.
- Engkoswara dkk. 2015. *Administrasi Pendidikan*. Bandung. Alfabeta.
- Mulyasa. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nur Zazin. 2011. *Gerakan Manata Mutu Pendidikan*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. Grasindo.
- Permendikbud. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta. Dharma Bhakti.
- Pramulyani, N. (2019). Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Madrasah Ibtidaiyah. MADROSATUNA. Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Bandung. Citra Umbara.
- Widiyarti dan Suranto. 2019. *Konsep Mutu dalam Manajemen Pendidikan Vokasi*. Semarang. Alprin.